



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

BANTU TERDAMPAK COVID-19: Pewarta foto Boy T Harjanto menjajakan buku-buku foto karyanya di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (5/6). Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, Boy menjual buku-buku fotografi karyanya dan hasil penjualannya akan disumbangkan untuk warga lereng Gunung Merapi yang terdampak pandemi Covid-19.

Pulang

secara normal, kondisi bayinya sehat dan belum diuji laboratorium. Ibu bayi masih di RS sedangkan bayi sudah dibawa pulang keluarganya," terang Berty.

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta Dr dr Irene MKM menambahkan terkait risiko penularan ibu bayi yang dinyatakan positif Covid-19 terhadap bayinya, belum ada penelitian atau laporan bahwa ASI bisa menularkan virus Korona sampai saat ini. Meski demikian, risiko bayi tertular infeksi virus Korona dari ibunya tetap ada.

"Penularan mungkin terjadi ketika ibu menyusui yang terjangkit virus Korona menyentuh bayinya dengan tangan yang belum dicuci, juga ketika ibu menyusui batuk atau bersin di dekat bayinya," tandas Irene.

Berty menuturkan total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di DIY mencapai 1.589 dengan 110 orang

masih dalam perawatan dan total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 6.917 orang. Sebanyak 238 orang dinyatakan positif dengan 175 orang di antaranya telah sembuh dan 8 orang meninggal serta 1.191 orang dinyatakan negatif berdasarkan hasil uji laboratorium.

"Sebanyak 160 orang masih dalam proses menunggu hasil proses laboratorium dengan 18 orang di antaranya telah meninggal dunia hingga saat ini," imbuh Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji menyatakan, tidak adanya kasus positif selama tiga hari berturut-turut dalam waktu berdekatan dilakukan rapid test massal di sejumlah titik, menjadi salah satu indikator bahwa kasusnya mulai bisa dikendalikan.

Kendati demikian, pihaknya meminta masyarakat DIY tidak lengah dan tetap mengedepankan protokol kese-

hatan. Semua itu akan bisa diwujudkan apabila masyarakat menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan senantiasa waspada.

"Penurunan kasus yang ada di DIY, tidak boleh menjadikan masyarakat abai atau lengah. Sebaliknya harus tetap diimbangi dengan sikap disiplin dari semua lapisan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Orang boleh beraktivitas tapi pertimbangan tiga hal yaitu jaga jarak, selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan," ungkap Baskara Aji.

Mantan Kepala Disdikpora DIY itu menambahkan, pemerintah daerah baik yang ada di tingkat kabupaten sampai desa harus menjadi mentoring buat masyarakat.

Dengan begitu diharapkan penerapan protokol kesehatan benar-benar bisa menjadi budaya dalam kehidupan di masyarakat. Apabila hal itu bisa diterapkan dengan baik dan disiplin, penyebaran Covid-19 diharapkan jadi lebih mudah dikendalikan. (Ira/Ria)-d

Sambungan hal 1

Mereformasi

Upaya tersebut meliputi: penguatan koordinasi dan sinkronisasi program, transparansi finansial, dan penegakan hukum.

WHO perlu memperbaiki pola koordinasi dalam penanganan virus. Kemampuan WHO untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespons dengan cepat terhadap wabah yang terjadi sangat penting untuk diperkuat untuk mencegah wabah tersebut menjadi bencana besar. Namun, respons WHO sangat bergantung dari laporan negara terhadap krisis kesehatan yang terjadi di wilayahnya.

Praktik yang ada menunjukkan, negara tidak bergerak cepat karena bayang-bayang ancaman ekonomi. WHO perlu mendorong penguatan lembaga kesehatan setiap negara anggotanya sehingga lebih integratif dan responsif dalam mengidentifikasi setiap kasus yang mengancam kesehatan masyarakat. Pola pemberian insentif akan lebih efektif untuk mendorong setiap negara agar memiliki kelembagaan yang kuat dan aktif dalam mendukung program serta tujuan WHO.

Sinkronisasi program kegiatan juga sangat penting dilakukan. Dalam menetapkan program yang akan diselenggarakan setiap tahun, WHO perlu

merujuk pada pemetaan permasalahan yang dihadapi setiap negara anggotanya.

Untuk dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan, WHO bergantung pada dua sumber pendanaan: kontribusi wajib dan kontribusi sukarela. Kontribusi wajib yang dilakukan oleh setiap negara anggota WHO yang dinilai berdasarkan rerata kekayaan negara dan jumlah populasi. Kontribusi ini lebih prediktif dan independen (tidak bergantung pada permintaan pendonor). Sedangkan kontribusi sukarela berasal dari negara anggota dan/atau mitra WHO lainnya yang sebagian besar organisasi non-pemerintah seperti Bill Gates Foundation.

Dari total kontribusi yang diperoleh WHO, sebagian besar berasal dari kontribusi sukarela (80%) dan sisanya berasal dari iuran wajib negara anggota WHO (20%). Ketergantungan WHO terhadap para pendonor sukarela sangat tinggi akibatnya program yang diselenggarakan cenderung mengikuti kepentingan para pendonor. Sehingga, kontribusi wajib yang berasal dari negara anggota perlu ditambah dan memastikan dana yang ada digunakan untuk mencapai tujuan utama WHO, bukan

kepentingan para pendonor. Kontribusi Amerika masih sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini.

Sampai saat ini belum semua negara anggota memberlakukan Peraturan Kesehatan Internasional (*International Health Organization/IHR*) dengan sepenuhnya ke dalam aturan domestiknya. Data WHO pada tahun 2014 menunjukkan bahwa baru terdapat 64 negara dari 196 negara peserta IHR yang mengimplementasikannya secara penuh. Ini pertama masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang dibuat WHO.

WHO perlu melakukan penegakan hukum terhadap negara yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Termasuk negara yang melakukan pelanggaran terhadap lambatnya penyampaian notifikasi atas wabah yang terjadi kepada WHO dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (Pasal 75 Konstitusi WHO). Penegakan aturan WHO di masa pandemi ini akan menjadi preseden baik dan meningkatkan kepatuhan negara terhadap kewajiban yang tertuang dalam konstitusi WHO dan perangkat aturan lainnya.

(Penulis adalah Dosen Tetap pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UII)-d

Sambungan hal 1

Dana Pilkada Segera Dicairkan

JAKARTA (KR) - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) segera dimulai 15 Juni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun meminta kepala daerah di 270 daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi melalui konferensi video terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, Jumat (5/6). "Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni," kata Tito.

Untuk diketahui telah diputuskan pilkada serentak di 270 daerah dilaksanakan 9 Desember 2020. Sedangkan tahapan pilkada yang dilanjutkan 15 Juni. Terkait hal itu, Mendagri Tito meminta pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya meski kontestasi berskala lokal, pilkada serentak di 270 menjadi pilkada terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

Tito meminta penyelenggara pemilu

dalam hal ini KPU mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya. Menurut Tito, apabila durasi kampanye dipersingkat, tahapan lanjutan masih bisa diundur ke awal Juli karena adanya penghematan waktu sekian hari. Ia ingin waktu yang dipangkas itu untuk membahas kegiatan-kegiatan yang memerlukan sosialisasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini mempertanyakan kesiapan tambahan anggaran Pilkada 2020 untuk memenuhi kebutuhan penerapan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan. Jika anggaran itu sudah dicairkan yang dikhawatirkan berikutnya terkait pengadaan barang oleh KPU di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Titi, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan kebutuhan tambahan itu tinggal beberapa hari, sedangkan tahapan pilkada akan dimulai kembali 15 Juni. "Skemanya seperti apa ini agak unik, karena kita dihadapkan di depan mata tapi regulasi anggaran masih *on going*," ujar Titi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, DPR sepakat untuk menambah anggaran Pilkada 2020. Namun, penambahan anggaran menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing. (Sim/Edi)-a

Pendapatan

Terjadinya Covid-19 membuat pendapatan mereka menurun. Sudarwadi selain menjadi tukang sampah juga berjualan pecel. Namun, sudah tiga bulan ini ia terpaksa menutup warungnya karena sepi nya pembeli.

Guna menghindari risiko terkena Covid-19, tukang sampah seperti mereka juga melingkupi diri dengan pelindung diri. Minimal sehari-hari, terutama saat mengumpulkan sampah mereka menggunakan masker. (Apw)-d

Sambungan hal 1

Tanpa

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berlaku tertib sesuai anjuran pemerintah. Yaitu selalu menjaga jarak dan berdiam di rumah. Namun jika terpaksa keluar rumah, warga agar selalu mengenakan masker.

Sementara Camat Dwi Sundarto mengatakan, kegiatan bakti sosial sebagai bentuk

kepedulian pemerintah Kecamatan Ampel dalam meminimalkan penyebaran Covid-19. Pihaknya juga melakukan sosialisasi langsung terkait pandemi tersebut.

"Kami sengaja menggelar kegiatan ini dengan memanfaatkan momen HUT ke-173 Kabupaten Boyolali" ungkapnya. (Mulyawan/Sit)-a

Sambungan hal 1

Aturan

dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara," ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Jumat (5/6) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah, wajib mengatur fleksibilitas lokasi bekerja. Setiap PPK mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah. Penentuan itu tentu dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

PPK juga bertugas menentukan pegawai yang bisa melaksanakan pekerjaan dari rumah. Beberapa pertimbangan untuk pegawai yang bisa melaksanakan tugas di rumah diantaranya adalah jenis pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja pegawai, kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, laporan disiplin pegawai, kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai, tempat tinggal yang bersangkutan berada di wilayah Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB), kondisi kesehatan keluarga pegawai terkait Covid-19, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri selama 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 negeri selama 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas unit organisasi.

Bagi daerah yang masih menetapkan PSBB, agar menugaskan pegawai untuk bekerja dari rumah namun tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan. Sementara bagi yang bekerja di sektor strategis, untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah minimum pegawai serta mengutamakan protokol kesehatan. Atmaji menerangkan untuk menjamin kelancaran pelayanan publik, instansi pemerintah harus melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi. "Unit penyelenggara pelayanan juga diharapkan bisa membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi," jelasnya. (Ati)-a

Sambungan hal 1

Tak Terkait

kebijakan moneter di Indonesia, bukan BPKH," kata Anggito Abimanyu dalam diskusi virtual BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jumat (5/6).

Dijelaskan, terkait keberangkatan haji, BPKH seharusnya menyiapkan Rp 14,5 triliun kepada Kementerian Agama (Kemenag). Dari angka tersebut, Rp 8,5 triliunnya berupa valuta asing atau valas. "Dalam keadaan normal, BPKH tugasnya menyiapkan dana kepada Kemenag. Jadi BPIH disetujui DPR, lalu Keppres diterbitkan, maka tugas kami menyiapkan dana. Bentuknya valas dan rupiah. Lebih banyak valas dari pada rupiah, jumlahnya Rp 14,5 triliun, sekitar Rp 8,5 triliun dalam bentuk valas, sisanya rupiah," kata Anggito.

Jadi, lanjutnya, dana yang berbentuk valas itu bukan digunakan untuk penguatan rupiah. "Dalam mengelola valas itu tentu kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Maka kalau dikatakan sebagai penguatan rupiah, itu adalah bagian dari operasi kami sebenarnya untuk mengadakan valas. Tapi kami tidak bertugas untuk melakukan penguatan rupiah," pa-

nyanya.

Ketika dana haji tahun 2020 tidak terpakai karena pembatalan keberangkatan, maka BPKH memiliki dua opsi untuk tetap menyimpan dalam bentuk valas, atau dijual dan mendapatkan rupiah. Saat ini imbal hasil dari deposito dolar itu hanya 1%, kalau dengan rupiah itu 5-6%, kalau dibelikan sukuk 7-8%. Kalau diinvestasikan langsung bisa 9-10%. Jadi pilihan kami adalah mencari portofolio yang memberikan nilai optimal untuk jemaah haji," terangnya.

Meski ada opsi-opsi tersebut, ia menegaskan BPKH tidak punya tujuan atau tugas untuk memperkuat nilai rupiah dengan menggunakan dana haji. "Jadi kalimat yang mengatakan dipakai untuk penguatan rupiah itu miss leading," tegas Anggito. (Ati)-d

Sambungan hal 1

MELATIH INGATAN BERHADIAH

PERTANYAAN MI BERHADIAH 3974
MENDATAR : 1.Bersifat kemanusiaan. 5.Nyanyian. 8.Jenis ikan hias. 9.Lipit pada baju. 10.Faham. 11.Aula. 12.Wawasan kedepan. 14.Kata sambung. 17.Rumah toko (singk). 18.Pahat. 19.Wilayah. 22.Tangga. 24.Meditasi. 27.Pulau karang. 28.Makna. 29.Gembira. 30.Jatah. 31.Asrama.

MENURUN: 2.Harga. 3.Berada di tempat lain. 4.Hewan air. 5.Perumpamaan. 6.Harian (ing). 7.Tetapi. 12.Ragam. 13.Aliran kepercayaan. 15.Pasukan. 16.Kerjakan. 20.Mutumanikam. 21.Gambar peta. 22.Kereta api (Ing). 23.Seniman. 25.Formulir (Ing). 26.Strategi.

KETENTUAN MENEBAK
1. Jawaban ditulis di kartupos, tempeli Kupon 3974
2. Paling lambat jawaban ditunggu 2 minggu setelah terbitan ini.
3. Akan dipilih 3 pemenang, masing-masing berhadiah Rp 75.000,-

JAWABAN MI 3964
MENDATAR : 1.Asumsi. 5.Atensi. 8.Gol. 9.gang. 10.Tala. 11.Avontur. 12.Riuh. 14.Akal. 17.Meet. 18.Upah. 19.Raih. 22.Gaun. 24.Awanama. 27.Roar. 28.Laba. 29.Moa. 30.Bahana . 31.Bahari.

MENURUN: 2.Spasi. 3.Megah. 4.Iglo. 5.Alot. 6.Exata. 7.Selia. 12.Rumor. 13.Upeti. 15.Kopra. 16.Lahan. 20.Aroma. 21.Harta. 22.Galah. 23.Umbar. 25.Atma. 26.Adab.

PEMENANG MI 3964
1. Rini Dwi Astuti, KTU SMN 1, Tepus, Gunungkidul 55882.
2. Mahendra Adhi, Ji dr Sutomo Dn 3/1007, Bausasran Yogya 55211.
3. Murwanto, Dispemasdes Kab Klaten, Ji Teratai No 2, Pondok, Klaten 57411. □x

KUPON MIB 3974

KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

Prakiraan Cuaca Sabtu, 6 Juni 2020
Cerah Berawan, Udaa Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir